BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha pertambangan adalah tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang dalam rangka perusahaan mineral atau batubara. Perusahaan pertambangan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang telah berbadan hukum perseroan terbuka (Go Public). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal Pasal 1 ayat 7 UU PT No.40/2007 yang menjelaskan bahwa perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham. Sedangkan Perseroan Publik merupakan perseroan yang memenuhi kriteria modal disetor dan jumlah pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal. (Pasal 1 ayat 8 UU PT No.40/2007).

Auditor independen harus melakukan audit Laporan keuangan perusahaan yang tergolong dalam perseroan terbuka dan melaporkannya kepada menteri keuangan. Hal ini tercantum pada ketentuan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 (perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998) yang menyebutkan bahwa akuntan publik yang telah melakukan audit laporan keuangan tahunan harus disampaikan oleh perusahaan jika telah memenuhi kriteria sebagai perseroan terbuka, serta memiliki jumlah aset paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan diturunkan menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) mulai tahun buku 2000.

Pasal 66 UU Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 memperkuat adanya pelaporan keuangan ini tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Laporan tahunan yang telah di audit dan ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus diserahkan oleh perseroan terbatas terbuka dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya tahun buku perseroan. Laporan keuangan berisi mengenai catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan kas dan posisi keuangan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini harus disampaikan kepada menteri keuangan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 pasal 2 mengenai “Jasa Akuntan Publik “(perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002) memulai adanya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai *auditor switching* dan auditor. Dijelaskan bahwa KAP dapat melakukan jasa audit umum atas laporan keuangan maksimal untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan

paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik dari satu entitas.

Kemudian dilakukan pembaharuan mengenai Peraturan tersebut dengan diresmikannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008) mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Dilakukan perubahan yaitu meliputi, jasa audit umum yang diberikan menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik (auditor) kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1), akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali tugas setelah 1 (satu) tahun buku tidak dapat memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Selanjutnya penjelasan mengenai jasa audit yang diberikan oleh seorang Akuntan Publik terhadap laporan keuangan historis terhadap suatu entitas diberi batas waktu paling lambat adalah berturut-turut 5 (lima) tahun buku yang dijelaskan pada PP No. 20 tahun 2011 pasal 11 ayat (1). Pemberian jasa audit juga dibatasi bagi Akuntan Publik yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi atas laporan keuangan historis tersebut yang dijelaskan pada PP No.20 tahun 2011 pasal 11 ayat (3). Pihak Terasosiasi yaitu Akuntan Publik yang terlibat langsung dalam pemberian jasa tapi tidak melakukan tanda tangan laporan auditor independen.

Auditor switching adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam rangka melakukan pergantian auditor. Hal tersebut dilakukan karena adanya kewajiban perputaran audit (*mandatory auditor*

switching). Kewajiban perputaran audit diatur dalam PP No.20 tahun 2015 atas laporan keuangan historis dengan tidak adanya aturan batasan paling lama periode perikatan audit antara entitas dengan KAP. Perikatan audit dapat dilakukan sebuah entitas terhadap historis laporan keuangan dengan Kantor Akuntan Publik yang serupa tanpa penentuan pembatasan waktu, harus dilakukan penggantian Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terasosiasi dengan syarat setiap maksimal berturut-turut 5 (lima) tahun buku oleh KAP terhadap dilakukannya audit historis laporan keuangan terhadap entitas tersebut. Indonesia mewajibkan Pergantian auditor (*auditor switching*) mengenai "Jasa Akuntan Publik". Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) melakukan pembahasan mengenai jasa audit umum yang diberikan dari suatu entitas atas laporan keuangan maksimal berturut-turut untuk 5 (lima) tahun buku dan paling lama untuk tiga (tiga) tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik. Kemudian disempurnakan lagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai "Jasa Akuntan Publik" yang menyebutkan paling lama adalah 6 (enam) tahun buku berturut-turut tentang pemberian jasa audit dari KAP terhadap klien dan paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik (pasal 3 ayat 1). Kedua, sesudah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien, akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit (pasal 3 ayat 2). Dengan adanya peraturan menteri

keuangan tersebut maka akan dilakukan perilaku perusahaan untuk pergantian auditor atau *auditor switching*. Wijayani dan Januarti (2011).

Pergantian KAP memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Oleh sebab itu hal ini telah secara komprehensif diteliti di negara-negara maju dan masih dipelajari melalui riset di Negara-negara Asia seperti Singapore, Hongkong, Korea dan Malaysia (Ismail dalam Sinarwati, 2010).

Faktor-faktor yang memengaruhi auditor switching pada penelitian ini yaitu variabel karakteristik KAP yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menambah kredibilitas laporan keuangan dari sisi pengguna.

Perubahan manajemen perusahaan dapat diikuti oleh pergantian aturan-aturan dalam hal keuangan, akuntansi, dan pemilihan KAP. Perusahaan akan membutuhkan KAP yang sesuai terhadap pelaporan akuntansi dan kebijakannya. Pihak manajemen membutuhkan auditor yang memiliki kualitas tinggi dan mampu menjalankan ketentuan cepatnya perkembangan perusahaan. Jika kondisi ini tidak terwujud, maka besar probabilitas bahwa perusahaan akan melakukan penggantian auditornya.

Karakteristik Perusahaan pada penelitian ini diwakili dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan yang dijelaskan dalam penjualan, total aktiva, dan kapitalisasi pasar. Jika penjualan, total aktiva, dan kapitalisasi pasar semakin besar maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Jika jumlah penjualan semakin banyak maka semakin banyak pula perputaran

uang, jika aktiva semakin besar maka semakin banyak modal yang ditanam, dan jika kapitalisasi pasar semakin besar maka semakin besar juga perusahaan tersebut akan diketahui oleh banyak orang. Wijayani (2011)

Kepemilikan publik merupakan rasio kepemilikan saham yang dipunyai oleh khalayak umum atau publik oleh saham perusahaan. Publik merupakan individu atau institusi yang ada diluar manajemen dan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan saham dibawah 5% (Suryantim, 2015)

Penelitian mengenai *auditor switching* pernah diteliti sebelumnya yang diteliti oleh Satriantini (2014) mengenai pergantian auditor pada perusahaan *real estate* dan *property* dimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasilnya menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh pergantian manajemen terhadap pergantian KAP selama 5 tahun pengamatan, sehingga ukuran KAP secara statistik tidak berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP (2009- 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti (2014) yang meneliti auditor switching pada perusahaan industry jasa menunjukkan kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) yang meneliti auditor *switching* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) terhadap perusahaan membuktikan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2013) yang meneliti auditor *switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia pada tahun (2013) yang meneliti perusahaan perbankan tahun 2008-2011 menunjukkan ukuran KAP secara sebagian berpengaruh terhadap *auditor switching*, pergantian manajemen dan kepemilikan publik, tidak berpengaruh secara sebagian terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2014) yang meneliti auditor *switching* di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan Industri Barang Konsumsi membuktikan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap KAP *switching*, ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap KAP *switching*, Variabel kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap KAP *switching*.

Suparlan (2014) yang meneliti *auditor switching* pada perusahaan Non Banking menunjukkan kepemilikan publik, kepemilikan publik mempengaruhi pergantian KAP, ukuran perusahaan berhubungan negatif

terhadap pergantian KAP, pergantian manajemen tidak mempengaruhi pergantian KAP.

Penelitian yang dilakukan Khasharmeh (2015), yang meneliti auditor *switching* pada perusahaan yang listed Bursa Efek di *Bahrain* membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap auditor *switching*, dan perubahan manajemen memiliki pengaruh positif terhadap auditor *switching*, sedangkan penelitian yang oleh Weiner (2012) yang meneliti meneliti auditor *switching* pada perusahaan yang ada di Florida Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ukuran atau kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap auditor *switching*.

Peneliti tertarik untuk meneliti ukuran Kantor Akuntan Publik, pergantian manajemen dan ukuran perusahaan, yang merujuk pada penelitian yang telah diteliti oleh Aprilia (2013) yang meneliti auditor *switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ukuran, dan pergantian manajemen terhadap auditor *switching* dan menambahkan variabel ukuran perusahaan yang diambil dalam penelitian Penelitian yang dilakukan Suryanti (2014). Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Pengaruh Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan dan Kepemimpinan Publik Terhadap Auditor *Switching* Pada Perusahaan Pertambangan Go Publik”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diangkat rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
2. Apakah pergantian manajemen memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching* ?
4. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di muka, adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan analisis dan uji pengaruh ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*
2. Untuk melakukan analisis dan uji pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor Switching*
3. Untuk melakukan analisis dan uji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Auditor Switching*
4. Untuk melakukan analisis dan uji pengaruh kepemilikan publik terhadap *Auditor Switching*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak wawasan keahlian dan dapat menjadi bahan diskusi, literatur pengetahuan, dan analisis lanjutan mengenai *auditor switching*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber informasi mengenai praktik *auditor switching* oleh perusahaan pada profesi akuntan publik.
- b. Sebagai sumber informasi dan referensi mengenai *auditor switching* untuk dilakukan penelitian selanjutnya.